

DINAMIKA PSIKOLOGIS PERILAKU KORUP KAUM ELIT POLITIK PEREMPUAN DAN UPAYA DAKWAH ISLAMIAH

*Hasyim Hasanah*¹

Abstract: *The main focus of this paper is to explore and analyze the motive and processes of elite women who commit bribery and corruption, analyzing the psychological impact of bribery and corruption of women, and mapping psychological points in finding propaganda strategy to overcome the corrupt behavior of the elite women. The method used in this paper is a qualitative descriptive phenomenological approach. The findings of this paper suggest that the elite women doing a lot of graft and corruption triggered by personal motives consumptive style which are very high. The process that is used to meet the expectation is to manipulate some administration financial documents such as marking-up the budget, distribute aspirations funds administration without valid proof. Psychological impact of this behavior that then arises is the rising level of stress, tending to become emotional and depressed. One effort that can be done to reduce the psychological impact of this behavior is by irsyad dakwah (good propaganda), i.e. the personal approach of the Islamic propaganda activities that involve more psychological aspects such as submission process and internalize the teachings of Islam, recognition, understanding, provide assistance, and resolve psychological problems.*

Kata Kunci: perilaku korup, elit perempuan, dan dakwah Islam.

A. PENDAHULUAN

Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif setelah hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis. Alasan perempuan Indonesia mampu dan dapat menjadi kekuatan perubahan bukan sesuatu yang mustahil. Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga penting menunjukkan signifikansi peran perempuan baik pada era reformasi maupun masa-masa sebelumnya bahwa perempuan Indonesia sudah terlibat dalam perjalanan bangsa sejak

¹ Penulis adalah dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

revolusi fisik sampai sekarang adalah modal sejarah yang bisa dipakai perempuan Indonesia dalam era reformasi yang sudah mengakui peran perempuan. Berdasarkan data perempuan yang duduk di legislatif hasil pemilu 2004, sebanyak 550 orang perempuan atau sekitar 10.7 % menjadi anggota DPR, 128 orang atau sekitar 21% anggota DPD, dan 1.849 orang atau sekitar 9 % anggota DPRD Tingkat I. Jumlah ini menunjukkan peran perempuan dalam aktivitas politik dari masa ke masa menunjukkan bahwa tidak mustahil angka optimisme 51% bisa tercapai sekaligus dapat membangun harapan baru masa depan masyarakat Indonesia.

Semakin diakuinya peran perempuan di dunia politik justru mematahkan harapan baru masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tatanan kehidupan demokrasi yang sejahtera, adil dan merata bebas dari korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPI) dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2006 hingga tahun 2012 terjadi peningkatan kasus pelanggaran moral yang disebabkan para politisi perempuan. Terhitung mulai tahun 2006, Mulya A Hasyim dan mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kemenkes, Ratna Dewi Umar terseret kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan wabah flu burung Departemen Kesehatan (Sekarang Kementerian) senilai Rp 52 miliar. Tahun 2008 dari 22 nama yang masuk kategori Koruptor Indonesia, dua kaum elit perempuan tersandung kasus suap dan korupsi yaitu Artalyta Suryani (terdakwa penyuaan jaksa senilai Rp 5,9 M) dan Harini Wiyoso (terdakwa kasus penyuaan MA sebesar Rp 4,8 M). Tahun 2009 dari 79 kasus, 3 perempuan (politisi asal Sragen dan Karanganyar ikut terlibat dalam kasus korupsi dua orang dari Jawa Tengah (Kasus Rehabilitasi Lift Gedung Keuangan Negara (GKN) dan Dana subsidi perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kabupaten Karanganyar).

Perilaku Korup semakin meningkat setelah tahun 2011 sebanyak tujuh politisi perempuan terlibat dalam kasus suap dan korupsi mulai dari Nunun Nurbaetie (kasus dalam suap cek pesawat DGS BI 2004, dia baru ditahan 10 Desember 2011), Malinda Dee mengeruk dana nasabah Citibank. Mindo Rosalina Manulang (terlibat kasus suap proyek Wisma Atlet). Imas Diansari, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung (kasus suap Rp 200 juta dari Manajer PT Onamba Indonesia Odi Juanda). Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina (Keduanya menerima suap se usai memilih Miranda Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia).²

Baru-baru ini, awal tahun 2012 dua kaum elit perempuan kembali ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan korupsi yaitu mantan putri Indonesia Angelina Sondakh, dia

² KP2KKN, Laporan Monitoring Penanganan Kasus Korupsi: Korupsi Elit Politik, Rilis Media, Desember, 2011.

ditetapkan terlibat suap Wisma Atlet 3 Februari 2012 (dijerat pasal 5 Ayat 2, pasal 10 dan pasal 11 atau pasal 12 UU Tipikor). Selanjutnya Dharnawati (terlibat kasus korupsi dan suap Kemenakertrans. Perilaku korup kaum elit perempuan tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi juga terjadi di daerah diantaranya: Mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari (tersangka korupsi pembebasan lahan senilai Rp 19 miliar), Rini Sukriswati Kabid Usaha Tani Dinas Perkebunan Jatim menjadi buron (kasus korupsi petani tebu Rp 28 miliar).

Kaum perempuan yang aktif di legislatif maupun eksekutif yang rentan menjadi korban dari maraknya praktik koruptif itu, sering terjadi seiring dengan lemahnya sistem di partai politik sehingga berpotensi menimbulkan praktik korupsi di kalangan politisi. Tidak dipungkiri bahwa kekuasaan dekat sekali dengan tindak pidana korupsi dan kasus suap, sehingga ada peluang untuk melakukan itu dalam konteks perilaku korup, baik menjadi korban dari satu sistem yang sudah ada, atau bisa jadi perempuan masih awam dengan masalah politik. Menurut Sri, 10 tahun terakhir ini, kaum perempuan terjun ke dunia politik terus meningkat sehingga secara pengetahuan politik masih awam dan mereka juga familiar dengan lika-liku di dalam legislatif, ataupun organisasi parpol. Oleh sebab itu, perempuan yang berkiprah di dunia politik mudah terseret.³ Padahal, hasil penelitian Bank Dunia tahun 1999, *Corruption And Woman In Government*, menyimpulkan, perempuan memiliki hasrat lebih rendah untuk menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut merekomendasi, jika jumlah anggota parlemen perempuan cukup banyak di suatu negara, hal itu berpotensi kuat menurunkan tingkat korupsi. Teori ini kemudian meyakinkan perempuan mampu menjadi pengontrol dan pengarah bagi lelaki yang sering gelap mata dan salah langkah. Banyak pihak percaya rasa malu menjadi kekuatan efektif bagi perempuan untuk tidak korupsi, seperti meminta-minta komisi. Rupanya teori tahun 1999 itu sudah bergeser. Saat ini perempuan justru memainkan peran strategis dalam praktik mafia hukum dan mafia kasus. Dalam kasus Imas Diansari, misalnya, Imas disangka berperan memenangi perkara PT Onamba Indonesia di tingkat Mahkamah Agung. Pergeseran ini dengan posisi dan kedudukan yang kini dijabat oleh para kaum elit perempuan yang telah menghilangkan budaya malu pada korupsi.⁴

Secara umum, ranah psikologi menyebutkan bahwa kecenderungan perempuan masuk dalam lingkaran korupsi disebabkan adanya mala-perilaku sosialnya dalam bentuk perilaku menyimpang dari norma sosial, penghargaan diri (*self esteem*), dan gaya hidupnya, sehingga

³ KP2KKN, Laporan Monitoring Penanganan Kasus Korupsi 2011: Regenerasi Korupsi Tiada Henti, Rilis Media, Januari 2012.

⁴ Hussein Alatas, *Sifat, Sebab dan Fungsi Korupsi* (Jakarta: LESFI, 1987), hlm. iv.

dalam psikologi dapat dikemukakan bahwa perilaku korupsi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, politik dan hukum, melainkan juga masuk dalam perilaku (*behavior*).

Korupsi sebagai suatu perilaku yang dipengaruhi berbagai faktor, baik individu maupun secara sosial, membawa dampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan para pelaku dan keluarganya dan kurang mendapat perhatian secara akademis. Realitas ini tentu cukup memprihatinkan, secara praktisi akademis tentu perlu upaya sistematis dalam mengantisipasi maraknya perilaku suap dan korup dikalangan elit perempuan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecenderungan praktik suap dan korupsi adalah dengan melakukan upaya dakwah Islam.

Dakwah merupakan suatu kegiatan dan proses penyadaran mental spiritual yang berorientasi pada perbaikan akhlak dan kepribadian islami. Dakwah juga merupakan kegiatan internalisasi nilai-nilai agama (Islam) pada diri seseorang, sehingga memungkinkannya menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai ajaran agama. Aep Kusmawan⁵ menyebutkan bahwa proses dakwah islamiah merupakan upaya atau jalan menyampaikan doktrin ajaran agama (Islam) dalam merubah perilaku para penganutnya, sehingga mampu mengurangi potensi negatif yang menjadi penyebab hilangnya fitrah ilahiah dalam diri penganutnya. Proses dakwah dapat dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan, salah satu kegiatan dakwah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam mengurangi dan menanamkan kepribadian Islam adalah melalui kegiatan *irsyad* dakwah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai sudut pandang keterlibatan kaum elit perempuan dalam korupsi dan kasus suap di Indonesia dari sisi psikologi. Selanjutnya menemukan upaya dakwah Islam untuk membentengi pribadi perempuan dari praktik suap dan tindak pidana korupsi. Untuk memperkuat pembahasan ini akan disajikan beberapa kajian riset sebelumnya sebagai upaya afirmatif pembahasan yang akan dilakukan. *Pertama*, penelitian berjudul *Memerangi kasus korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi (Studi Kasus Penanganan Kasus Korupsi Pemerintah Daerah)* oleh Taufiq Rinaldi, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor apa yang mendorong pengungkapan korupsi di tingkat lokal, mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokal, mengidentifikasi modus operandi korupsi serta aksi dan strategi aktor pendorong penyelesaian kasus korupsi dan mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan kasus korupsi. *Mereka Panggil Aku Koruptor* oleh Nadia Salama,

⁵ Aep Kusmawan, "Napak Tilas Perjalanan: Dari Dakwah ke Ilmu Dakwah" dalam, *Dimensi Ilmu Dakwah: Tinjauan Dakwah dari Aspek Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, hingga Paradigma Pengembangan Profesionalisme* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 60.

penelitian ini mengkaji fenomena korupsi dari makna pengalaman seseorang melakukan korupsi dengan pendekatan kualitatif-fenomenologis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa (1) motif melakukan korupsi adalah faktor personal dan solidaritas sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi, (2) cara mengatasi dengan menggunakan pendekatan *dakwah islamiyah (irsyad Islam)*.

B. PERILAKU KORUP

United Nation Development Programme (UNDP) mengidentifikasi bahwa kasus korupsi dikalangan elit politik kian meningkat sehingga memungkinkan banyak kajian dalam berbagai perspektif seperti politik, ekonomi, sosial, hukum dan kekuasaan. Praktik korupsi merupakan isu strategis dalam menggali makna perilaku individu. Disebutkan demikian karena korupsi merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang berdampak pada kompleksitas aturan dan norma yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Korupsi menjadi problem kejahatan kemanusiaan yang luar biasa (*extraordinary crime and crimes against humanity*).⁷ Dikatakan demikian karena dapat mengakibatkan kemiskinan berkepanjangan. Korupsi bukan hanya persoalan individual, melainkan menjadi persoalan sistemik dan akan menjangkiti siapa saja yang berada disekitarnya.

1. Praktek Suap dan Korup Elit Perempuan

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir mencapai 6.432 kasus korupsi di dunia, atau sekitar 63,67% meningkat setiap tahunnya (Teten, 2010). Di Jawa Tengah terjadi 102 kasus korupsi, data yang berhasil kami himpun terkait dengan kerugian negara pada setiap kasus adalah sejumlah 63% setiap tahunnya, 32 diantaranya adalah koruptor perempuan.⁸

Penelitian yang dilakukan Rinaldi, dkk, menemukan bahwa kecenderungan korupsi dikalangan elit politik membawa dampak sosial daripada kasus kriminal lainnya. Dampak psikologis ini lebih terlihat pada koruptor perempuan. Punch menjelaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan seperti perilaku korupsi secara tidak langsung dapat berakibat pada perkembangan psikologi diri perempuan, mereka akan disisihkan dari komunitas sosial. Hal ini dikarenakan, masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai elemen pembangun karakter (*character building elementary*) bagi anak. Perilaku korupsi perempuan akan menyebabkan perkembangan mental anak terganggu, melahirkan perilaku

⁶ Jeremy Pope, *Curbing Corruption* (New York: The World Bank, 1999), hlm. 99.

⁷ Taylor Joan, "Corruption of the social approach", *Journal of economic*, Vol. II, No. 5, 2009), hal. 175

⁸ KP2KKN, Laporan Monitoring Penanganan Kasus Korupsi: Korupsi Elit Politik, Rilis Media, Desember, 2011.

menyimpang, pelanggaran moral dan tekanan mental.⁹ Beberapa hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak bisa dianggap sebagai kejahatan yang biasa.

Mengidentifikasi pengalaman korupsi kaum elit perempuan, disebutkan bahwa semakin perempuan memiliki akses yang luas dalam sektor publik maka kecenderungan munculnya perilaku korup akan semakin meningkat. Peningkatan ini dipicu karena beberapa faktor yaitu mengenai perilaku hidup konsumerisme. Perilaku ini menjadi gaya hidup baru bagi para kaum elit perempuan. Gaya hidup konsumerisme didasarkan pada pemahaman psikologi struktural bahwa perempuan lekat dengan peran domestiknya, suka berbelanja, berbusana dan menghias diri. Perempuan mestinya dapat memerankan peran politiknya sebagai pembaharu tatanan kehidupan pemerintahan, bukannya malah terbawa arus kehidupan yang konsumeris.

Selain hal ini, ada dugaan bahwa perempuan memiliki pemahaman yang awam mengenai konsep politik praktis, sehingga hal ini memungkinkan mereka memiliki persepsi yang keliru tentang keterwakilannya dalam parlemen atau posisi strategisnya. Persepsi yang keliru ini terjadi karena adanya disorientasi konseptualisasi makna posisi sosial yang diperankan seseorang. Disorientasi ini muncul sebagai respon tidak sadar bahwa dirinya sedang masuk dalam lingkaran sistem yang tidak kondusif dan tidak sesuai dengan mekanisme tatanan nilai yang ada. Hal ini tentu akan melahirkan salah persepsi (*mal perception*).

Kesalahan persepsi selanjutnya akan melahirkan penilaian yang keliru terhadap setiap perilakunya. Dalam konsepsi korupsi penilaian keliru ini muncul sebagai bentuk upaya memperkaya diri sendiri. Lebih dari itu juga dijelaskan bahwa perilaku korupsi identik dengan perilaku menyimpang yang dilakukan secara tidak disadari, karena penilaian terhadap perilaku yang keliru. Kekeliruan ini diakibatkan dari respon negatif yang kemudian dipahami sebagai suatu kewajaran. Kewajaran ini termanifestasikan dalam rumusan ABC; *Affective*, suatu bentuk ketidak-konsistenan sikap pada tata pola kehidupan, maksudnya melahirkan sikap keluar dari tata nilai, sikap pasif dan cenderung tidak mempedulikan dampak perilakunya; *Behavior* yaitu kemampuan untuk melibatkan diri dari upaya memperkaya diri, mencapai kesenangan dan lain sebagainya; dan *Cognitive* yaitu mempraktikkan kepiawaian dan posisi strategisnya dalam memanfaatkan kesempatan yang dimiliki ketika duduk dalam jabatannya.

Di samping itu, ada juga pendapat yang menjelaskan bahwa perilaku korup sangat terkait dengan pemaknaan hidup yang keliru. Motif yang biasa dilakukan seseorang dalam

⁹ Martin Lutter, "The level of Corruption", *Journal on Criminal Policy an research*, No. 1, Vol. 1, 2012.

kasus korupsi diantaranya adanya faktor solidaritas sosial para anggota politisi, dan perempuan memiliki kecenderungan mudah menampakkan solidaritas sosial, sebagai wujud eksistensinya; faktor jabatan. Dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan kaum elit perempuan, sebagian besar dikarenakan posisi strategis perempuan menduduki jabatan tertentu, seperti sebagai panitia anggaran, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya.

Seperti halnya pada kasus korupsi yang dilakukan politisi laki-laki, proses korupsi pada perempuan dilakukan melalui penggelembungan anggaran, penyaluran dana aspirasi tanpa bukti administrasi yang sah. Proses korupsi terjadi melalui ketidakcermatan sistem monitoring dan pengawasan dari penyelenggara. Dugaan lain mengarah pada proses penyuapan kepada beberapa pihak yang terlibat secara sistematis. Beragamnya dugaan proses korupsi ini tentu perlu diidentifikasi lebih lanjut mengingat proses selalu berkaitan dengan apa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana suatu aktivitas dilakukan. Perempuan semestinya harus menjalankan fungsi strategisnya sebagai monitor pelaksanaan kerja suatu lembaga, bukannya menjadi aktor pelaku korupsi. Problematika yang memprihatinkan. Apalagi mendasarkan pada dampak psikologis yang akan diterimanya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

2. Faktor Perilaku Korup dan Suap kaum Elit Politik Perempuan

Korupsi adalah sebuah tindakan aksi atau perilaku. Sebagaimana perilaku lainnya, ia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor sosial maupun faktor individual. Faktor sosial penyebab perilaku korup bermacam-macam, karenanya pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena korupsi juga beraneka ragam, misalnya pendekatan sosial budaya, pendekatan agama, pendekatan hukum, dan pendekatan politik. Namun agaknya pendekatan individual terhadap korupsi kurang mendapat perhatian. Padahal sebagai sebuah perilaku manusia, korupsi lahir pula dari faktor psikologis manusianya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor terjadinya korupsi secara individual diantaranya: *pertama*, adalah sikap yang dimiliki kaum elit politik perempuan. Bila seseorang memiliki sikap yang positif terhadap korupsi maka kecenderungan seseorang untuk melakukan korupsi cenderung besar.

Kedua, adalah intensi atau niat untuk melakukan korupsi. Baik sikap positif maupun negatif terhadap korupsi bisa melahirkan niat untuk berkorupsi. Seseorang yang bersikap positif mungkin berniat melakukan korupsi mungkin juga tidak. Sebaliknya seseorang yang memiliki sikap negatif mungkin tidak berniat mungkin juga berniat. Ketiga, norma subjektif yang diyakini individu. Norma subjektif ini dipengaruhi diantaranya oleh tingkat religiusitas. Bila seseorang memiliki tingkat keberagamaan yang lebih matang daripada umumnya

masyarakat maka kecenderungan orang itu untuk melakukan korupsi juga kecil, karena adanya ancaman lebih tegas dalam agama mengenai korupsi. Keempat, adalah kesempatan yang tersedia untuk melakukan korupsi. Faktor kesempatan ini merupakan faktor yang paling dekat dengan perilaku korupsi. Kelima, hobi dan kesenangan bergaya hidup mewah atau konsumerisme. Perilaku ini nampaknya lebih banyak menjangkiti kaum elit politik perempuan. Gaya hidup glamor yang dimiliki beberapa kaum elit perempuan terlihat dari penampilan, sikap dan perubahan yang terjadi pada elit politik perempuan.

Secara sosial faktor yang menyebabkan maraknya kasus suap dan praktik korup dikalangan elit perempuan adalah persoalan sistem kepartaian yang ada pada beberapa partai politik di Indonesia. Kecenderungan ini secara kolektif menyebabkan perempuan ikut ambil bagian dalam lingkaran kasus suap dan praktik korupsi. Selanjutnya terkait dengan sistem solidaritas yang memungkinkan terjadinya korupsi. Rata-rata kasus suap dan perilaku korupsi sangat terkait dengan sistem solidaritas partai yang ada. Hal ini tentu menjadi faktor yang perlu segera dilakukan pembenahan.

3. Dampak Psikologis Perilaku Korup Elit Perempuan

Perilaku suap dan praktik korupsi secara umum membawa dampak psikologis yang sangat besar. Dampak yang paling jelas adalah dampak psiko-sosial, yaitu perasaan malu disertai dengan tekanan mental akibat proses isolasi masyarakat, khususnya pada perkembangan anak-anaknya. Secara sosial, masyarakat memiliki stigma negatif bahwa para pelaku suap dan praktik korupsi sangat tidak layak hidup berdampingan dengan masyarakat, hal ini dikarenakan ada stereotip sosial yang dimiliki masyarakat, di manapun pelaku korupsi dan suap ada, maka di situlah mereka akan melakukan hal yang sama. Stereotip ini tentu akan melahirkan tekanan psikologis yang berat bagi para pelaku suap dan korupsi.

Selain itu masyarakat memandang bahwa para pelaku korupsi dan kasus suap telah membuat kemiskinan dalam masyarakat semakin tinggi dan membuat masyarakat semakin melarat. Akibat dari perilaku itu selanjutnya akan membuat masyarakat berupaya melakukan isolasi sosial terhadap seluruh aspek kehidupan mulai dari isolasi terhadap akses sosial, partisipasi sosial, dan dukungan sosial. Tentu hal ini akan semakin mempersusah ruang gerak para pelaku korupsi dan kasus suap.

4. Upaya Dakwah Islamiah

Dakwah dapat didefinisikan dengan usaha menyampaikan, mengajak atau menyeru manusia untuk mengenali Islam, menerima dan menghayatinya yang dilaksanakan sesuai

kaedah, cara dan pendekatan tertentu.¹⁰ Secara etimologis dakwah bermakna ajakan, sedangkan dalam terminologi artinya adalah menggunakan akal pikiran dalam rangka menyelamatkan manusia dari rasa jauh dan lupa terhadap Allah Swt agar menjadi dekat dan ingat, dengan berbagai sarana dan metode. Wujud dari aktivitas dakwah di masyarakat melibatkan dua dimensi besar yaitu *kerisalahan* dan *kerahmatan*.

Dimensi *kerisalahan* menyangkut upaya penyampaian pesan secara benar dan sempurna (efektif dan efisien), sedangkan dimensi *kerahmatan* yaitu mencakup pengaplikasian nilai-nilai kebenaran dan kesalihan. Pada tingkatan penyampaian pesan islami target utamanya adalah agar manusia lebih mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Islam sebagai pandangan hidup, sehingga penyampaian pesan tersebut dapat berujung pada perubahan perilaku manusia kearah yang makin islami. Lebih lanjut dijelaskan, dimensi *kerisalahan* tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran umat dan terjadi proses internalisasi. Dalam dimensi ini diturunkan menjadi dua hal yaitu yang disebut dengan *irsyad* dan *tabligh*.

Irsyad berarti penyebarluasan ajaran Islam yang sangat spesifik di kalangan tertentu (melibatkan hubungan personal) khususnya dalam proses penakhlukan ilham takwa atau internalisasi ajaran Islam. Sedangkan *tabligh* merupakan penyebarluasan ajaran Islam yang memiliki ciri-ciri tertentu yaitu bersifat insidental, oral, missal, seremonial, bahkan kolosal, melibatkan beragram *agregat social* dari berbagai kalangan. Dalam kerangka *tabligh*, kegiatan komunikasi Islam atau dakwah mencakup penyebarluasan ajaran Islam melalui sarana pemancar atau sarana transmisi dengan menggunakan media elektromagnetik. *Tabligh* juga bermakna difusi yaitu penyebarluasan ajaran Islam dengan bahasa lisan, tulisan melalui bermacam media yang berorientasi pada khalayak.¹¹

Kegiatan dakwah yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak psikologis praktik suap dan korup para elit perempuan adalah kegiatan dakwah yang berorientasi pada terbangunnya kesadaran dan perbaikan mental spiritual para pelaku korup. Kegiatan ini masuk dalam wilayah kegiatan *irsyad* dakwah. Melalui *irsyad* dakwah akan dimungkinkan adanya proses penakhlukan ilham takwa, dalam hal ini berarti bahwa upaya dakwah yang dilakukan secara simultan dan kontinyu diarahkan pada meresapi nilai-nilai ajaran agamanya, selanjutnya akan menghasilkan penerimaan diri dan timbulnya rasa sadar terhadap diri sendiri (*self awarennes*). Munculnya kesadaran diri sebagai manusia sangat memberikan arti penting

¹⁰ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 24-27.

¹¹ Aep Kusmawan, "Napak Tilas Perjalanan ...", hlm. 17-18.

dalam perkembangan karakter dan kepribadian seorang individu.¹² Kondisi ini sangat membantu individu menyadari seluruh tugas kemanusiaan dan tanggung jawabnya.

Tugas kemanusiaan dan tanggung jawab itu terkait dengan tugas ganda sebagai *Khalifah fi al ardh* dan sebagai *abdullah*. Sebagai *Khalifah fi al ardh* ditekankan pada kemampuan sebagai penguasa, pemimpin juga sebagai pengganti atau wakil Allah di muka bumi yaitu untuk mengelola, mengolah, mengatur, membangun dan mengembangkan agar dunia menjadi hunian nyaman, aman, indah, dan makmur, sehingga mereka mampu menikmati hasil karya dengan tenang, tentram, damai dalam suasana penuh perdamaian dan cinta kasih. Dalam perspektif ini manusia berhak untuk memanfaatkan segala ciptaan Allah dengan ikhlas dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab kedua sebagai *abdullah*. Manusia dalam melaksanakan aktivitas di dunia harus menyadari asal muasal penciptaan dan kejadiannya, yaitu untuk beribadah dan meningkatkan kecintaan kepada Allah dengan keikhlasan, kepatuhan, tunduk dan istiqomah.¹³ Tanggung Jawab manusia memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam pencapaian tujuan dakwah. Sebagaimana diungkapkan Roosdi tujuan dakwah dapat tercapai apabila pelaku dakwah secara komprehensif memahami dan peduli terhadap aktivitas dakwah, dan sebagai *khalifah fi al ardh* dan *abdullah* manusia harus mampu menyeimbangkan peran dakwah. Kedudukan sebagai *khalifah fi al ardh* menuntut manusia untuk dapat melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang begitu melimpah. Sedangkan sebagai *abdullah* manusia memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi keberagamaan dan ibadahnya seperti *amar ma'ruf nahi mungkar*, pelaksanaan rukun iman dan Islam secara konsisten.¹⁴ Dengan menyadari potensi ini individu akan melakukan pertimbangan yang matang sebelum melakukan perilaku negatif atau justru terjerat ada bentuk praktik sosial yang membawa kerusakan pada tata kehidupan umat manusia secara lebih luas.

Kegiatan *irsyad* juga berarti kegiatan dakwah yang sarat akan penanaman nilai-nilai ajaran agama.¹⁵ Dengan menanamkan nilai-nilai ajaran agama, tentu akan membekali umat dalam menjalani kehidupan, hal ini dikarenakan didalam setiap ajaran agama tentu memiliki nilai-nilai ilahiah (ketuhanan) dan monial (keduniaan). Pemahaman terhadap nilai-nilai ini tentu akan dapat memberikan rambu-rambu dalam bersikap dan bertindak. Dengan adanya

¹² Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 15.

¹³ Miftah Ahmad Fathoni, *Pengantara Ajaran Islam: Pendekatan Sains Dalam Memahami Agama* (Semarang : Gunung Jati, 2001), hlm. 18.

¹⁴ A.S. Roosdi, *Dakwah Aktual: Solusi Problem Keberagamaan Umat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm 1

¹⁵ Syamsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21.

pemahaman ini diharapkan ada suatu upaya mengentaskan dampak psikologis pelaku suap dan korupsi secara komprehensif dan sistematis. Hal ini dimaksudkan agar potensi individual dapat dikenali sehingga internalisasi ajaran agama dan nilai sosial dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga perilaku korup kaum elit perempuan dapat diminimalisir.

Pada kasus suap dan korupsi kaum elit perempuan, tentu upaya dakwah ini semakin penting dilakukan tidak hanya sekedar upaya mengurangi dampak psikologis dari perilaku suap dan korup, melainkan juga sebagai upaya dalam rangka melakukan upaya membentengi diri dari perilaku yang tidak dianjurkan agaman. Perempuan sebagai salah satu pendidik utama dalam keluarga tentu menjadi pertimbangan penting perlunya dakwah sebagai mekanisme pembentengan diri kaum perempuan. Hal ini dikarenakan secara psikologis perempuan memiliki kedekatan emosi yang lebih dibandingkan dengan laki-laki kaitannya dengan pola pengasuhan kepada anak-anaknya. Perempuan biasanya menjadi *role model* utama para anak, karena dengan keberadaannya, perempuan lebih memiliki kecenderungan ditiru para anaknya.

Kondisi demikian tentu menuntut suatu konsekuensi logis bahwa perempuan yang baik akan mempengaruhi perkembangan anak-anaknya. Sebaliknya perempuan yang banyak melakukan perbuatan tidak baik, secara tidak langsung akan membawa dampak bagi perkembangan anak secara lebih luas, anak akan menjadi nakal, bahkan tak jarang melahirkan sikap dan perilaku seperti yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, bagi para perempuan mutlak mendapatkan perhatian khusus dalam pemahaman terhadap nilai ajaran agamanya, sehingga akan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama.

C. PENUTUP

Praktik suap dan korupsi yang dilakukan oleh sebagian kaum elit perempuan dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan keikutsertaan perempuan dalam ranah politik di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kesempatan, melainkan persoalan sistem yang ada di komunitas elit pemerintahan. Motif yang biasanya muncul adalah akibat kesempatan memanfaatkan posisi dan jabatan dalam rangka memperkaya atau memenuhi kebutuhan hidup yang konsumtif. Bagi para elit perempuan ini, motif utama yang dimiliki adalah adanya *personal consumptive style* atau gaya hidup konsumtif pribadi. Proses suap dan korupsi ini dilakukan melalui penggelembungan anggaran, penyaluran dana aspirasi tanpa bukti administrasi yang sah. Dampak psikologis yang kemudian muncul dari perilaku

ini adalah meningkatnya tingkat stresing, cenderung menjadi emosional dan depresif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak psikologis perilaku ini adalah dengan kegiatan *irsyad* dakwah, yaitu pendekatan personal kegiatan dakwah Islam yang lebih banyak melibatkan aspek psikologi berupa proses penyampaian dan internalisasi ajaran Islam, pengenalan, pemahaman, memberi bantuan, dan menyelesaikan problem psikologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Hussein, 1987. *Sifat, Sebab dan Fungsi Korupsi*, Jakarta: LESFI.
- Amin, Syamsul Munir, 2009. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah.
- Fathoni, Miftah Ahmad, 2001. *Pengantara Ajaran Islam: Pendekatan Sains Dalam Memahami Agama*, Semarang: Gunung Jati.
- Hamdi, Muluk, 2008. *Psikologi Korupsi*, Harian Seputar Indonesia.
- Huntington, Samuel, 1968. *Political order in Change Society*, New Heaven: Yale University Press.
- Joan, Taylor, 2009. "Corruption of the Social Approach", *Journal of economic*, Vol. II, No. 5.
- Joseph, 1967. "Corruption and Political Development", *American Political Science Review*.
- KP2KKN, 2011. Laporan Monitoring Penanganan Kasus Korupsi: Korupsi Elit Politik, Rilis Media, Desember.
- KP2KKN, 2012. Laporan Monitoring Penanganan Kasus Korupsi 2011: Regenerasi Korupsi Tiada Henti, Rilis Media, Januari.
- Kusnawan, Aep (Ed), 2009. "Napak Tilas Perjalanan : Dari Dakwah ke Ilmu Dakwah", dalam, *Dimensi Ilmu Dakwah: Tinjauan Dakwah dari Aspek Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, hingga Paradigma Pengembangan Profesionalisme*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Lutter, Martin, 2012. "The level of Corruption", *Journal on Criminal Policy an research*, No. 1, Vol. 1.
- Nurdjana, I.G., 2005 *Korupsi dalam praktik Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Pope, Jeremy, 1999. *Curbing Corruption*, Ney York: The World Bank.
- _____, 2003. *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Rais, M. Amien, 1996. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan.
- Roosdi, A.S., 1992. *Dakwah Aktual: Solusi Problem Keberagamaan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press.

Saputra, Wahidin, 2011, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Rajawali Press,.

Schramm, Mattias (ed)., 2005. *The new Institution Economic of Corruption*, Abingdom, Oxon RN: Routledge.

Sri, dan Wardani, 2012. *Keterlibatan Politisi Perempuan dalam Kasus Suap*, Laporan Penelitian.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.